

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan publik di Indonesia hingga saat ini masih menghadapi berbagai permasalahan, terutama terkait kualitas pelayanan, pemerataan akses, keterbatasan sumber daya, serta minimnya sarana prasarana. Penyelenggara pelayanan publik bertanggung jawab untuk menyediakan layanan yang adil dan merata bagi seluruh warga negara dan penduduk, sehingga hak serta kebutuhan dasar mereka dapat terpenuhi. Pelayanan publik pada hakikatnya berhubungan dengan manfaat yang diperoleh oleh masyarakat. Manfaat publik tersebut selanjutnya dapat dimaknai sebagai nilai publik atau *public value* yang dirasakan oleh masyarakat sebagai penerima layanan. Setiap pemerintah maupun lembaga penyelenggara layanan publik tentu berkewajiban menghadirkan nilai publik yang dapat dirasakan oleh masyarakat dengan memperhatikan kualitasnya. Dengan demikian, untuk mengelola layanan agar menjadi layanan yang berkualitas, organisasi publik sebagai penyedia layanan harus mampu memenuhi kebutuhan serta memperoleh kepercayaan dari masyarakat (Hasanah et al., 2024).

Kualitas pelayanan publik di Indonesia dapat dilihat melalui indeks pelayanan publik. Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (2017), Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia

berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Menurut Mozin (2024), Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah alat ukur yang dipakai untuk mengevaluasi standar layanan publik yang diterima masyarakat dari organisasi pemerintah. IPP menilai berbagai aspek layanan, seperti kecepatan, ketepatan, keterjangkauan, serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diperoleh.

Tabel 1.1 Data Indeks Pelayanan Publik Berdasarkan Provinsi di Indonesia Tahun 2025

No.	Provinsi	Predikat	Indeks Pelayanan Publik
1	Jawa Timur	A	4,75
2	DKI Jakarta	A	4,73
3	Jawa Tengah	A	4,72
4	Kalimantan Barat	A	4,71
5	Daerah Istimewa Yogyakarta	A	4,69
6	Bali	A	4,68
7	Jawa Barat	A	4,63
8	Aceh	A	4,56
9	Kalimantan Selatan	A	4,56
10	Gorontalo	A	4,48

Sumber: Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2026

Berdasarkan Tabel 1.1, dengan jelas menunjukkan bahwa di tingkat provinsi, Jawa Timur menempati posisi sebagai peringkat pertama di Indonesia yang meraih predikat A dengan nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebesar 4,75. Nilai IPP yang tinggi dapat merefleksikan kemampuan pemerintah provinsi dalam menjalankan fungsi koordinasi, pendampingan, dan pemantauan pelaksanaan layanan publik di tingkat kabupaten/kota. Capaian tinggi tersebut menunjukkan adanya komitmen

pemerintah daerah dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik, termasuk pengembangan berbagai inovasi daerah sebagai strategi pemerataan layanan publik.

Menurut penelitian Hertati (2023) mengenai inovasi pelayanan publik di Indonesia yang menganalisis secara komprehensif karakteristik dan trennya menunjukkan bahwa pemerintah daerah cenderung menjadi pelaku inovasi paling menonjol dalam sektor publik di Indonesia. Hal ini selaras dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (2017) menjelaskan bahwa “inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”, inovasi daerah diarahkan untuk memperkuat efektivitas pelaksanaan pemerintahan daerah. Tujuan utama inovasi daerah adalah mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui: peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, serta pengembangan daya saing daerah. Namun, capaian indeks pelayanan publik tidak selalu mencerminkan nilai yang secara langsung dirasakan masyarakat. Pelayanan publik yang diberikan pemerintah saat ini masih memiliki berbagai kelemahan, sehingga kualitas layanan yang diterima masyarakat belum sepenuhnya memenuhi harapan (Sari & Suparti, 2023). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan *public value* untuk melihat sejauh mana pelayanan benar-benar memberikan manfaat substantif, memperoleh legitimasi, serta didukung oleh kapasitas operasional yang memadai.

Pada Provinsi Jawa Timur, tidak semua daerah memiliki kondisi pelayanan publik yang merata. Pada Kabupaten Trenggalek masih menghadapi tantangan, seperti geografis Kabupaten Trenggalek yang sebagian wilayahnya terletak di

daerah pesisir dan pegunungan. Hal tersebut menyebabkan akses masyarakat menuju kantor perangkat daerah menjadi cukup jauh dan memerlukan waktu yang tidak sedikit. Kemudian, rendahnya literasi digital, dibuktikan oleh survei Indeks Masyarakat Digital Indonesia oleh BPSDM Komdigi (2025), bahwa Kabupaten Trenggalek mendapatkan angka IMDI sebesar 38,54. Angka tersebut menunjukkan bahwa saat ini masyarakat digital di Trenggalek masuk dalam klasifikasi rendah. Selain itu, infrastruktur dan fasilitas layanan di desa yang terbatas juga menjadi sebuah tantangan dalam pemerataan pelayanan publik.

Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai inovasi Program Mening Deh menurut Vanessa et al (2026) mengemukakan bahwa komitmen kepemimpinan berjalan baik melalui dukungan pemerintah, meskipun tanpa struktur dan juknis yang jelas. Kapasitas organisasi tergolong cukup baik, namun masih terbatas pada belum adanya SOP dan struktur kelembagaan. Partisipasi masyarakat juga cukup baik, terlihat dari antusiasme warga dalam memanfaatkan layanan. Dukungan regulasi masih lemah karena hanya berbentuk surat edaran tanpa aturan teknis yang lengkap. Kolaborasi multi-aktor berjalan efektif melalui koordinasi antara pemerintah daerah, kecamatan, desa, dan OPD. Evaluasi berkelanjutan telah dilakukan secara rutin, namun masih internal saja. Kemudian penelitian terdahulu lainnya mengenai beberapa pelayanan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek menunjukkan tantangan sebagai berikut, menurut Supriyanto (2023), pelaksanaan Program GERTAK di Kabupaten Trenggalek masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain minimnya keterlibatan kelompok sasaran, keterbatasan anggaran dan sarana prasarana, serta rendahnya literasi

masyarakat terhadap penggunaan teknologi informasi. Selain itu, pada penelitian Pratama & Rahaju (2022), mengemukakan bahwa akibat medan yang berbukit-bukit di Kabupaten Trenggalek, layanan administrasi keliling menghadapi tantangan terkait infrastruktur dan fasilitas, seperti hanya memiliki dua kendaraan yang dapat beroperasi, yang tidak mencukupi untuk melaksanakan tugas perekaman. Diperlukan penambahan kendaraan operasional baru bertujuan untuk memperluas jangkauan hingga ke daerah terpencil. Kemudian pada penelitian Lestari (2025), mengemukakan bahwa pelayanan publik Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek melalui aplikasi SIMINAKSOPAL dan Program JEMPOL KEREN masih terdapat tantangan, kompleksitas SIMINAKSOPAL disebabkan oleh gangguan jaringan yang terjadi secara tiba-tiba, sedangkan kompleksitas JEMPOL KEREN disebabkan oleh sulitnya akses menuju lokasi tersebut. Serta pada penelitian Devi & Meirinawati (2022), mengungkapkan bahwa layanan langsung pada kantor DPMPSTSP masih menjadi pilihan utama bagi masyarakat umum. Sehingga dapat dilihat dalam penelitian tersebut terdapat faktor penghambat yaitu sosialisasi yang kurang maksimal. Meskipun sudah mendapatkan sosialisasi, sebagian masyarakat masih mengandalkan pelayanan secara langsung ke kantor perangkat daerah karena takut adanya kesalahan saat mengisi persyaratan yang diperlukan.

Berdasarkan tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Trenggalek meluncurkan inovasi yaitu Mening Deh (Makaryo Ning Deso, Desa Hebat). Mening Deh digagas oleh Bupati Trenggalek, Mochammad Nur Arifin, pada awal tahun 2023 dan menunjuk Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek sebagai

fasilitator. Kegiatan ini merupakan inovasi pelayanan berbasis jemput bola yang menjadikan berbagai pelayanan perangkat daerah langsung di desa-desa terutama di wilayah terpencil (Pemerintah Desa Malasan, 2025). Kegiatan ini diharapkan mampu mempercepat pemerataan pelayanan publik, mengurangi hambatan geografis, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan yang dimiliki oleh perangkat daerah di Kabupaten Trenggalek.

Dasar pelaksanaan Mening Deh (Makaryo Ning Deso Desa Hebat) diatur dalam surat edaran Bupati Trenggalek Nomor 130/42/406.04/2023 tentang Pelaksanaan Makaryo Ning Deso Tahun 2023 yang kemudian ditindaklanjuti dalam surat edaran Bupati Trenggalek Nomor 130/67/406.001.1 tentang Makaryo Ning Deso Desa Hebat (Mening Deh). Dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa kegiatan Mening Deh merupakan kegiatan “bekerja” yang dilakukan oleh Bapak Bupati/Bapak Wakil Bupati Trenggalek bersama-sama dengan Perangkat Daerah se-Kabupaten Trenggalek dalam rangka mendekatkan pelayanan ke masyarakat, mendengarkan keluhan atau menginventarisir permasalahan di desa dan mencari solusi dari permasalahan tersebut secara *on the spot* (di tempat) maupun permasalahan kompleks yang harus didiskusikan terlebih dahulu di tingkat kabupaten.

Kegiatan ini pertama kali dilaksanakan pada Januari 2023 di Desa Banaran, Kecamatan Tugu. Pada tahun 2023, kegiatan tersebut dilaksanakan setiap minggu, tepatnya setiap hari Rabu. Namun, seiring bertambahnya jumlah masyarakat yang telah terlayani, frekuensinya kemudian disesuaikan yaitu pada tahun 2024 program dilaksanakan dua kali dalam sebulan dan pada tahun 2025 menjadi satu kali dalam

sebulan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara bergilir di seluruh kecamatan di Kabupaten Trenggalek dan penyelenggara atau perangkat daerah pengampu pada setiap kegiatan ditetapkan secara bergiliran. Penyelenggara atau perangkat daerah pengampu bertanggung jawab menentukan tema kegiatan Mening Deh dengan mempertimbangkan capaian, tujuan, serta sasaran penerima layanan di kecamatan. Sementara itu, penentuan desa lokasi pelaksanaan kegiatan ditetapkan oleh camat dengan mempertimbangkan akses menuju lokasi dan jumlah perangkat daerah yang berpartisipasi dalam kegiatan.

Meskipun sudah berjalan selama tiga (3) tahun, pelaksanaan Mening Deh masih menghadapi sejumlah permasalahan. Selain jarak antara kecamatan dan kantor perangkat daerah, terdapat beberapa faktor lain yang memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan pada Mening Deh. Berdasarkan hasil wawancara pendahuluan peneliti dengan Ibu Nur Zohainis Rahmawati selaku Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, sebagai dinas yang memberikan pelayanan dasar melalui Mening Deh, diketahui bahwa informasi mengenai pelaksanaan program masih kurang disebarluaskan, sehingga sebagian besar masyarakat masih belum menyadari adanya kegiatan ini di kecamatannya. Kemudian, keterbatasan fasilitas turut menjadi penyebab terhambatnya proses pelayanan. Di sisi lain, pelayanan pada kantor desa yang sudah berjalan dengan baik juga membuat sebagian masyarakat merasa cukup terlayani oleh perangkat desa yang aktif membantu kebutuhan administratif mereka. Dalam hal ini termasuk dengan adanya kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang aktif di desa,

sehingga dianggap sudah mendapatkan pelayanan di kantor UPTD. Dengan demikian, berbagai faktor ini secara bersama-sama memengaruhi rendahnya persepsi nilai yang diterima masyarakat terhadap pelaksanaan Mening Deh.

“Informasi pelaksanaan program kurang digencarkan jauh-jauh hari sebelum hari pelaksanaan, baik dari perangkat daerah pengampu maupun perangkat daerah yang memberikan pelayanan, sehingga banyak masyarakat yang belum tahu. Kemudian jaringan yang naik turun dan ketika cuaca yang terlalu panas, alat-alat untuk pelayanan tidak bisa menyesuaikan. Selain itu, petugas desa yang aktif membantu administrasi membuat masyarakat merasa cukup datang ke kantor desa.” (Hasil wawancara pra-penelitian, 12 November 2025)

Berdasarkan hasil observasi pra-penelitian, terdapat masalah dalam kehadiran perangkat daerah, yaitu tidak semua perangkat daerah pemberi layanan selalu hadir pada kegiatan Mening Deh. Kemudian, pemanfaatan pelayanan berbasis digital masih kurang pada masyarakat desa, sehingga masyarakat seharusnya membutuhkan pelayanan langsung di desa. Kurangnya pemanfaatan pelayanan digital dapat disebabkan oleh akses internet yang belum merata. Berikut data jumlah pelayanan Kegiatan Mening Deh (Makaryo Ning Deso Desa Hebat) di 14 kecamatan di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2023-2024.

Tabel 1.2 Jumlah Masyarakat yang Terlayani pada Setiap Kecamatan Tahun 2023-2024

No.	Kecamatan	2023	2024
1	Panggul	474	3196
2	Munjungan	2436	0
3	Pule	3760	2125
4	Dongko	3064	2183
5	Tugu	3657	0
6	Karangan	1469	1801
7	Kampak	3533	2284
8	Gandusari	3335	0
9	Durenan	4040	0
10	Suruh	3789	2305
11	Pogalan	2885	0

No.	Kecamatan	2023	2024
12	Trenggalek	1362	0
13	Watulimo	4539	2321
14	Bendungan	1152	0
	Total	43767	16215

Sumber: Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Trenggalek, 2025

Berdasarkan data pada Tabel 1.2, kecamatan yang memiliki jarak cukup jauh dari kantor perangkat daerah, khususnya wilayah pesisir dan pegunungan, cenderung lebih aktif memanfaatkan program ini. Hal tersebut terlihat dari jumlah masyarakat yang terlayani, yang secara konsisten lebih tinggi dibandingkan kecamatan yang berlokasi dekat dengan kantor perangkat daerah. Kecamatan Watulimo dipilih sebagai lokus penelitian karena merupakan salah satu kecamatan wilayah pesisir dengan jumlah masyarakat terlayani yang relatif tinggi dibandingkan kecamatan lain, sehingga menarik untuk dianalisis bagaimana *public value* pelayanan publik melalui Mening Deh pada konteks wilayah yang memiliki karakteristik geografis tertentu.

Pada data tahun 2024 terdapat hasil yang tertulis 0 karena kegiatan pada tahun 2024 dilaksanakan pada bulan September, sehingga tidak semua kecamatan di Kabupaten Trenggalek mendapatkan giliran untuk pelaksanaan kegiatan. Selain itu, penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan juga mempertimbangkan dinamika kebijakan dan administrasi pemerintahan daerah. Pada dasarnya pelaksanaan kegiatan Mening Deh harus mendapatkan persetujuan dari Bupati Trenggalek dan Sekretaris Daerah. Berikut tabel jumlah jenis pelayanan pada setiap Perangkat Daerah dan jumlah masyarakat yang terlayani pada tahun 2023-2024.

Tabel 1.3 Jumlah Jenis Pelayanan per-OPD dan Jumlah Terlayani Tahun 2023-2024

No	Instansi/Perangkat Daerah	Jumlah jenis pelayanan per OPD	Jumlah terlayani tahun 2023	Jumlah terlayani tahun 2024
1	Dinas Perhubungan	11	43	73
2	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	5	6669	1473
3	Dinas Perikanan	16	2704	664
4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3	603	137
5	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	12	1180	535
6	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan	6	2315	316
7	Dinas Peternakan	9	3391	853
8	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah	4	72	48
9	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	12	1308	656
10	Badan Kepegawaian Daerah	4	134	119
11	PT Jwalita Energi Trenggalek	4	47	123
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2	8	11
13	Dinas Lingkungan Hidup	11	1415	517
14	BPR Jwalita	11	118	69
15	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	9	426	280
16	Dinas Pertanian	14	4842	516
17	RSUD Dr. Soedomo	4	106	74
18	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9	4898	501

No	Instansi/Perangkat Daerah	Jumlah jenis pelayanan per OPD	Jumlah terlayani tahun 2023	Jumlah terlayani tahun 2024
19	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	6	342	232
20	Dinas Kesehatan PPKB	27	9196	6332
21	Dinas Sosial PPPA	8	934	369
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6	1621	1167
23	Badan Keuangan Daerah	4	529	380
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5	84	84
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	167	127
26	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan	7	45	68
27	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	1	4	4
28	Dinas Komunikasi dan Informatika	11	126	132
29	Bank Jatim	8	114	102
30	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	2	168	55
31	Badan Kesbangpol	1	60	88
32	Inspektorat	2	24	53
33	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	2	74	57
	Total	241	43767	16215

Sumber: Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Trenggalek, 2025

Berdasarkan Tabel 1.3, dapat diketahui bahwa terdapat 241 jenis layanan yang disediakan oleh perangkat daerah yang berpartisipasi. Dinas Kesehatan PPKB Kabupaten Trenggalek merupakan instansi yang paling banyak memberikan

pelayanan pada kegiatan Mening Deh (Makaryo Ning Deso Desa Hebat) di tahun 2023 dan 2024. Hal tersebut menandakan bahwa Dinas Kesehatan PPKB Kabupaten Trenggalek merupakan instansi yang pelayanannya paling dibutuhkan masyarakat Kabupaten Trenggalek. Oleh karena itu, informasi terkait program perlu lebih dipublikasikan agar banyak masyarakat Kabupaten Trenggalek yang mengetahui mudahnya akses pelayanan publik melalui Kegiatan Mening Deh (Makaryo Ning Deso Desa Hebat). Sehingga nilai substansial yang dihasilkan dari Mening Deh (Makaryo Ning Deso Desa Hebat) dapat dirasakan oleh masyarakat. Menurut Moore (1995) terdapat tiga aspek utama yang memengaruhi *public value* yaitu: nilai substansial, legitimasi dan dukungan, dan kapabilitas operasional.

Pada aspek nilai substansial, yaitu berkaitan dengan sejauh mana suatu pelayanan publik mampu memberikan manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat sebagai penerima layanan. berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara pra-penelitian, diketahui bahwa pemanfaatan layanan oleh masyarakat masih belum merata karena informasi mengenai pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya tersosialisasikan secara luas. Selain itu, sebagian masyarakat masih mengandalkan pelayanan administratif di kantor desa atau Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang dinilai sudah cukup membantu kebutuhan mereka. Kondisi ini menunjukkan bahwa manfaat pelayanan yang ditawarkan melalui kegiatan Mening Deh belum sepenuhnya dirasakan secara optimal oleh seluruh masyarakat, sehingga penting untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana nilai substansial dari pelayanan publik tersebut benar-benar tercipta dalam pelaksanaannya. Berikut jenis

pelayanan dasar yang ada di pelayanan publik Mening Deh (Makaryo Ning Deso Desa Hebat):

Tabel 1.4 Data Jenis Pelayanan Dasar dan Wajib Non Dasar di Mening Deh

No	Perangkat Daerah	Jenis Pelayanan
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek	1) Fasilitasi KK 2) Fasilitasi KIA 3) Fasilitasi KTP 4) Fasilitasi Akte Kematian 5) Jebol Perekaman 6) Perekaman ODGJ 7) Perekaman biometrik wajib KTPel Pemula 8) Fasilitasi Akte Kelahiran 9) Identitas Digital 10) SKPWNi 11) Validasi NIK
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek	1) AKSI BERGIZI dan GERMAS di SD dan TK 2) Pemeriksaan Gigi dan demo sikat gigi di SD dan TK 3) Stimulasi, Intervensi, Deteksi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) di TK Dharma Wanita 4) Stimulasi, Intervensi, Deteksi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) Balita di Polindes 5) Kelas ibu hamil 6) Pengawasan kualitas air pada keluarga dengan anak stunting 7) Pemetaan reseptif malaria (pemeriksaan jentik anopheles) 8) Skrining penderita TBC 9) Skrining kesehatan jiwa 10) Membantu perekaman KTP bagi penderita ODGJ 11) Pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BHD) pada Care Giver 12) Pelayanan Skrining PTM (Penyakit Tidak Menular) pada lansia 13) Skrining Kesehatan Lansia 14) Launching Gadis Pentas Sanggul Perak

No	Perangkat Daerah	Jenis Pelayanan
		15) Pelayanan KB bergerak 16) Pemberian ijin PIRT 17) Pemberian ijin SLHS (Sertifikat Laik Sehat Laik Higiene) 18) Pemberian ijin Labeling 19) Skrining Kesehatan Indera 20) Pendampingan keluarga Bumil dan Pasca Salin oleh Tim Pendamping Keluarga (Bidan, PKK dan PPKBD 21) Gema Cermat Ibu Balita 22) Gema Cermat PTM 23) Pelayanan Posyandu PTM dan Lansia 24) Pendampingan pengurusan perizinan usaha berbasis resiko berupa IRTTP melalui Sistem SPPIRT BPOM Terintegrasi OSS 25) Peningkatan kapasitas Tim Pendamping Keluarga dalam melaksanakan kegiatan Pendampingan Catin, Bumil dan Pasca Persalinan 26) Pendampingan pengurusan perizinan usaha berbasis resiko berupa Labeling melalui Sistem OSS RBA 27) Pemeriksaan Jentik DBD
3	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek	1) Pelayanan Gertak dan Penanganan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) 2) Survey Data Kemiskinan Ekstrim 3) Penyaluran Sembako Untuk Masyarakat Miskin 4) Penyaluran Bantuan Kursi Roda Untuk Disabilitas 5) Edukasi Pengurus Panti terkait Ijin 6) Edukasi eks Klien Pelatihan UPT Dinsos Prov 7) Pendampingan kepada Pilar-pilar Sosial 8) Bantuan Makan Anak

Sumber: Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Trenggalek, 2025

Adapun pada aspek legitimasi dan dukungan berdasarkan hasil observasi pendahuluan ditemukan bahwa tidak semua perangkat daerah pemberi pelayanan hadir ketika pelaksanaan kegiatan Mening Deh. Kemudian, dasar pelaksanaan Mening Deh (Makaryo Ning Deso Desa Hebat) hanya berbentuk Surat Edaran bukan berupa peraturan bupati ataupun undang-undang. Kemudian dukungan dari masyarakat di setiap kecamatan belum merata jika mengacu pada data jumlah masyarakat yang memanfaatkan pelayanan, hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya sosialisasi oleh perangkat daerah pemberi pelayanan.

Selain itu, aspek kapabilitas operasional sangat penting bagi terciptanya *public value*. Temuan wawancara pendahuluan dan hasil observasi yang dilakukan, peneliti mengetahui bahwasanya sumber daya yang disediakan oleh perangkat daerah penyelenggara dan pemberi layanan, seperti akses *Wi-Fi* dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek serta kelengkapan fasilitas pelayanan yang tersedia pada setiap perangkat daerah pemberi layanan. Namun, fasilitas yang tersedia pada setiap desa tidak sama, seperti persiapan tenaga listrik yang belum tersedia di semua balai desa. Kemudian, dedikasi dan sikap positif para petugas pelayanan sangat penting untuk memberikan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan temuan awal dari salah satu wawancara masyarakat yaitu Ibu Lina Krisnawati dengan peneliti, mengindikasikan bahwa petugas pelayanan menunjukkan sikap dan interaksi yang baik kepada masyarakat.

“Ini pertama kali saya mengikuti ini mbak, saya merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Informasi yang diberikan petugas sudah jelas dan sangat membantu, pelayanannya juga cepat. Saya jadi tidak perlu jauh pergi ke kota untuk mendapatkan pelayanan.” (Hasil wawancara pra-penelitian, 10 Desember 2025)

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Mening Deh belum sepenuhnya menciptakan nilai publik, baik dari aspek nilai yang dirasakan masyarakat, dukungan dan legitimasi antar perangkat daerah, maupun kapabilitas operasional penyelenggara. Relevansi ketiga aspek tersebut dengan pelaksanaan Kegiatan Mening Deh menjadi dasar pemilihan teori *public value* Moore (1995) sebagai landasan teori dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil tinjauan literatur yang telah dilakukan, belum ada penelitian yang mengkaji pelayanan publik Mening Deh dalam perspektif *public value*, khususnya di Kecamatan Watulimo. Kekosongan literatur ini menunjukkan adanya gap penelitian sekaligus menegaskan pentingnya kajian mendalam untuk memahami bagaimana pelayanan publik Mening Deh ini dijalankan dengan perspektif *public value* di Kecamatan Watulimo. Berdasarkan urgensi di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Analisis *Public Value* Pada Pelayanan Publik Mening Deh (Makaryo Ning Deso Desa Hebat) di Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana *Public Value* pada pelayanan publik Mening Deh (Makaryo Ning Deso Desa Hebat) di Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan serta menganalisis *Public Value* pada pelayanan publik Mening Deh (Makaryo Ning Deso Desa Hebat) di

Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek menggunakan teori *Public Value* Mark H. Moore.

1.4 Manfaat Penelitian

Sejalan dengan arah tujuan penelitian yang telah diuraikan dan dirumuskan secara komprehensif sebelumnya, pelaksanaan penelitian ini diharapkan mampu memberikan sejumlah manfaat penting serta kontribusi yang bernilai bagi berbagai pihak, di antaranya sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengetahui mengenai *Public Value* pada pelayanan publik Mening Deh (Makaryo Ning Deso Desa Hebat) di Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a) Bagi Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jawa Timur, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya koleksi literatur di perpustakaan kampus yang nantinya dapat dimanfaatkan sebagai sumber inspirasi dan referensi pembandingan bagi para peneliti yang akan melaksanakan kajian dengan topik serupa pada masa mendatang.
- b) Bagi Instansi Terkait, penelitian ini dapat berfungsi sebagai sumber informasi komprehensif dan landasan referensi bagi para pegawai Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek sebagai pelaksana dan Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek yang bertugas menyelenggarakan Kegiatan Mening Deh (Makaryo Ning Deso Desa Hebat) di Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek.

- c) Bagi penulis, yaitu sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial, Budaya dan Ilmu Politik di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Dapat mengimplementasikan konsep-konsep teoritis dan wawasan akademis yang didapat selama menempuh pendidikan di jurusan Administrasi Publik.